



## Peran Bank Syariah dalam Membangun Kemitraan untuk Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals Poin 17) di Sumatera Barat

Suci Ramadhani<sup>1\*</sup>, Sandra Dewi<sup>2</sup>

<sup>1-2</sup>Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Indonesia

\*Penulis korespondensi: [sibungsuciramadhani@gmail.com](mailto:sibungsuciramadhani@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract.** *The role of Islamic banks in building partnerships to support the achievement of Sustainable Development Goal 17 in West Sumatra. This point emphasizes the importance of collaboration between various parties to achieve inclusive, sustainable, and equitable development. As financial institutions based on Islamic principles, Islamic banks have a social responsibility to play an active role in community economic empowerment and strengthen cross-sector collaboration, particularly in the micro, small, and medium enterprise (MSME) sector. This research used a descriptive qualitative method with secondary data obtained from the financial reports of Islamic banks in West Sumatra from 2021 to 2023. The results indicate that Islamic banks play a role in building partnerships through various financing schemes such as murabahah, mudharabah, and musyarakah. Furthermore, Islamic banks also establish strategic partnerships with local governments, businesses, and local communities to strengthen financial literacy, expand financial inclusion, and promote economic equality within the community based on Islamic values. Despite their significant contribution, Islamic banks still face challenges such as low public understanding of Islamic financial products, limited technology and human resources, and suboptimal synergy between institutions. Therefore, regulatory strengthening, innovation in Islamic banking services, and support from all stakeholders are needed to ensure effective partnerships and maximize their contribution to achieving the SDGs in West Sumatra.*

**Keywords:** *Development Objectives; Financial Inclusion; MSME Empowerment; Sharia Financing; Strategic Partnerships*

**Abstrak.** Peran bank syariah dalam membangun kemitraan untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) poin 17 di Sumatera Barat. Poin ini menekankan pentingnya kerja sama antara berbagai pihak dalam rangka mewujudkan Pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan. Bank syariah sebagai Lembaga keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah memiliki tanggung jawab sosial untuk berperan aktif dalam pemberdayaan ekonomi Masyarakat serta memperkuat kolaborasi lintas sektor, khususnya dalam sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan bank syariah di Sumatera Barat pada tahun 2021 sampai 2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bank syariah berperan dalam membangun kemitraan melalui berbagai skema pembiayaan seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah. Selain itu, bank syariah juga menjalin kerja sama strategis dengan pemerintah daerah, pelaku usaha, dan komunitas lokal untuk memperkuat literasi keuangan, memperluas inklusi keuangan, serta mendorong pemerataan ekonomi Masyarakat berbasis nilai-nilai Islam. Meskipun memiliki kontribusi yang signifikan, bank syariah masih menghadapi tantangan seperti rendahnya pemahaman Masyarakat terhadap produk keuangan syariah, keterbatasan teknologi dan sumber daya manusia, serta belum optimalnya sinergi antar Lembaga. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, inovasi layanan perbankan syariah, serta dukungan dari seluruh pemangku kepentingan agar kemitraan yang dibangun dapat berjalan efektif dan berkontribusi maksimal terhadap pencapaian SDGs di Sumatera Barat.

**Kata kunci:** Kemitraan Strategis; Pembiayaan Syariah; Inklusi Keuangan; Pemberdayaan UMKM; Tujuan Pembangunan

### 1. LATAR BELAKANG

Masa sekarang dikenal sebagai era pengembangan dan pembangunan sehingga diharuskan setiap individu bisa mengadaptasikan diri. Selain itu, pada era saat ini alasan seseorang bisa menjadi pengaruh besar untuk perkembangan pengetahuan dunia.

Pembangunan bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang meliputi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. (Fatmasari, 2022) Namun, pelaksanaannya seringkali mengabaikan aspek lingkungan, menyebabkan kerusakan dan pencemaran yang semakin parah. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan. Menurut Walter A. Friedlander dalam Whibawa dkk., kesejahteraan sosial merupakan usaha yang dilakukan oleh lembaga sosial untuk membantu individu atau kelompok mencapai taraf hidup yang layak dan memuaskan serta mengembangkan kemampuan mereka secara maksimal. (Fatmawati, 2022)

Pembangunan berkelanjutan merupakan agenda global yang diwujudkan melalui Sustainable Development Goals (SDGs), yang terdiri dari 17 tujuan utama. Salah satu tujuan penting adalah SDGs Poin 17, yaitu Kemitraan untuk Mencapai Tujuan (Partnerships for the Goals). Tujuan ini menekankan pentingnya kolaborasi lintas sector pemerintah, swasta, masyarakat, dan lembaga keuangan untuk mempercepat pencapaian pembangunan berkelanjutan di berbagai wilayah, termasuk di Sumatera Barat.

Sustainable Development Goals (SDGs) mempunyai 17 program pembangunan berkelanjutan. Dengan kehadiran SDGs dimaksudkan guna mengembangkan dan menumbuhkan perekonomian masyarakat. (Citra Ramadhani, et al., 2022) Tujuan SDGs yang akan berlaku mulai tahun 2015 dan akan ditargetkan akan tercapai pada 2030 merupakan pekerjaan yang tidak mudah dan membutuhkan upaya yang serius dari pemerintah. (Matondang, 2018)

Menurut laporan Bertelsmann Stiftung (2020), pencapaian SDGs di Indonesia menghadapi berbagai tantangan serius yang memerlukan upaya terkoordinasi dari berbagai pihak. Laporan tersebut menekankan bahwa keberhasilan pencapaian SDGs membutuhkan komitmen yang kuat dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Sinergi antara kebijakan publik yang efektif, praktek bisnis yang bertanggung jawab, dan partisipasi aktif masyarakat sangat penting untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Pendekatan komprehensif ini akan membantu Indonesia mengatasi masalah kemiskinan, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan secara terintegrasi, dan bergerak menuju pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Implementasi SDGs di Indonesia pada aspek regulasi sudah baik dan sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Namun, terdapat kekurangan dan ketidaksesuaian dalam pelaksanaannya yang menyebabkan meningkatnya kesenjangan sosial dalam 10 tahun terakhir. (Wartoyo, W, & Haida, N, 2023)

Sistem perbankan Syariah sudah seharusnya menjadi sarana pendukung untuk mewujudkan tujuan dari sistem sosial dan ekonomi Islam, oleh karenanya sistem perbankan

Islam diharapkan memiliki tujuan kemakmuran ekonomi yang meluas dengan tingkat kerja yang penuh dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimum serta mewujudkan keadilan sosial ekonomi, distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata. Peran perbankan syariah dalam mengembangkan usaha masyarakat terutama pada usaha mikro adalah dengan berpartisipasi memberikan pembiayaan kepada masyarakat untuk mengembangkan usahanya, baik usaha perorangan maupun usaha dalam bentuk kelompok, dengan harapan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat dari tahun-ketahun terus mengalami peningkatan. Oleh karenanya, perbankan syariah terus mendukung agar nasabah pembiayaan usaha mikro dapat terus mengalami peningkatan perekonomian. (Aziz, A, & Nur'aisyah, 2021)

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan, peran bank syariah dalam membangun kemitraan untuk pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs Poin 17) di Sumatera Barat sangat strategis dan multifaset. Bank syariah berkontribusi secara nyata dalam mendukung pembangunan berkelanjutan melalui penyediaan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, yang menekankan keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan masyarakat. Di Sumatera Barat, khususnya di kota Bukittinggi sebagai salah satu pusat ekonomi dan pariwisata, bank syariah seperti Bank Syariah Indonesia (BSI) telah aktif menyalurkan pembiayaan berbasis murabahah dan mudharabah kepada pelaku UMKM.

Di Sumatera Barat, potensi ekonomi syariah sangat besar karena didukung oleh budaya dan agama masyarakat yang mayoritas muslim. Pemerintah daerah bersama bank syariah, seperti Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Bank Nagari Syariah, telah menjalin berbagai kemitraan strategis untuk memperluas akses keuangan syariah, mendorong literasi keuangan, dan memperkuat pemberdayaan ekonomi umat. Kolaborasi ini tidak hanya meningkatkan inklusi keuangan, tetapi juga memperkuat ekosistem ekonomi syariah yang berkelanjutan di wilayah tersebut.

Implementasi SDGs di Sumatera Barat juga didukung oleh regulasi daerah, seperti Rencana Aksi Daerah (RAD) SDGs, serta berbagai program kolaboratif antara pemerintah, perguruan tinggi, dan lembaga keuangan syariah. Namun, tantangan masih dihadapi, seperti keterbatasan akses, literasi keuangan, dan sinergi antar-stakeholder yang belum optimal. Oleh karena itu, peran bank syariah dalam membangun kemitraan menjadi sangat krusial untuk mempercepat pencapaian SDGs, khususnya poin 17, di Sumatera Barat.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan menggambarkan peran bank syariah dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs poin 17) di

Sumatera Barat tahun 2021–2023, dengan lokasi penelitian pada bank syariah di Sumatera Barat dan menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan yang diperoleh melalui teknik dokumentasi dari situs resmi OJK, yang dianalisis melalui tahapan reduksi data, display data, serta penarikan kesimpulan secara kualitatif.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil penelitian mengenai peran bank syariah dalam membangun kemitraan strategis guna mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals), khususnya poin ke 17 yang menekankan pentingnya kemitraan global dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

#### Peran Bank Syariah Indonesia (BSI)

**Tabel 1.** Peran Bank Syariah Indonesia (BSI).

NO	Sektor	Tahun		
		2021	2022	2023
1.	Energi Terbarukan	905.704	1.135,35	1.072,23
2.	Efisiensi Energi	-	-	-
3.	Pencegahan dan Pengendalian Polusi	-	-	-
4.	Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati dan Penggunaan Lahan Yang Berkelanjutan	1.193.012	3.095.21	4.805,87
	Konservasi Keanekaragaman Hayati Darat dan Air			
5.	Konservasi Keanekaragaman Hayati Darat dan Air	-	-	-
6.	Transportasi Ramah Lingkungan	19.500	34,65	47,26
7.	Pengelolaan Air dan Limbah Yang Berkelanjutan	100.884	114,63	94,06
8.	Produk Yang Dapat Mengurangi Penggunaan Sumber Daya dan Menghasilkan Sedikit Polusi (Eco-Efficient)	3.774.124	4.497,89	5.806,99
9.	Adaptasi Perubahan Iklim	-	-	-
10.	Bangunan Berwawasan yang Lingkungan yang Memenuhi Standar yang di Akui Secara Nasional, Regional, atau Internasional	225.172	190,12	163,19
11.	Kegiatan Usaha atau Kegiatan Yang Berwawasan Lingkungan Lainnya	508.341	258,79	245,09
12.	UMKM	39.461.229	41,823,61	45.468,99
	<b>Total Pembiayaan Usaha Berkelanjutan</b>	<b>46.157.97</b>	<b>51.150,26</b>	<b>57.703,68</b>
	<b>Total Keseluruhan Pembiayaan (Triliun)</b>	<b>171.291.16</b>	<b>207,704,86</b>	<b>240,32</b>

Tabel di atas menggambarkan perkembangan realisasi pembiayaan usaha berkelanjutan yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) selama kurun waktu tiga tahun, yaitu dari tahun 2021 hingga 2023. Data ini menunjukkan kontribusi BSI dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan, khususnya melalui pembiayaan pada sektor-sektor yang relevan dengan prinsip keuangan berkelanjutan dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Secara umum, terdapat tren peningkatan pembiayaan usaha berkelanjutan, dari sebesar Rp 46,15 triliun pada tahun 2021, menjadi Rp 51,15 triliun di tahun 2022, dan mencapai Rp 57,70 triliun pada tahun 2023. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa BSI semakin memperkuat komitmennya terhadap prinsip keberlanjutan dan mendukung pembiayaan kepada sektor-sektor yang mendukung pencapaian SDGs.

Sektor dengan kontribusi terbesar selama tiga tahun berturut-turut adalah sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang nilainya mencapai Rp 39,46 triliun (2021), Rp 41,82 triliun (2022), dan Rp 45,46 triliun (2023). Besarnya kontribusi sektor ini menunjukkan bahwa BSI berperan aktif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, penciptaan lapangan kerja, dan pengurangan kesenjangan sosial. Dalam konteks kemitraan, pembiayaan UMKM dapat merepresentasikan bentuk kolaborasi antara sektor keuangan dengan pelaku usaha local.

Sektor lainnya menunjukkan tren peningkatan signifikan adalah pengelolaan sumber daya alam hayati dan penggunaan lahan berkelanjutan, serta produk eco-efficient. Pembiayaan pada sektor konservasi meningkat dari Rp1,19 triliun di tahun 2021 menjadi Rp 4,80 triliun di tahun 2023. Sementara itu, pembiayaan untuk produk yang mengurangi polusi meningkat dari Rp3,77 triliun menjadi Rp 5,80 triliun. Kedua sektor ini menunjukkan kesadaran BSI dalam mendukung Upaya pelestarian lingkungan hidup dan mitigasi dampak perubahan iklim.

Namun demikian, terdapat beberapa sektor yang masih belum tersentuh pembiayaannya, seperti sektor efisiensi energi, pencegahan polusi, dan adaptasi perubahan iklim. Ketidakhadiran realisasi pembiayaan pada sektor-sektor tersebut menunjukkan adanya ruang strategis yang masih bisa dioptimalkan ke depannya. Dalam hal total keseluruhan pembiayaan, proporsi pembiayaan berkelanjutan terhadap total pembiayaan BSI berkisar antara 24% hingga 27%. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun komitmen terhadap pembiayaan berkelanjutan semakin meningkat, proporsinya terhadap keseluruhan pembiayaan masih memiliki potensi untuk ditingkatkan melalui sinergi dan inovasi produk pembiayaan hijau.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa BSI telah memainkan peran penting dalam mendukung implementasi keuangan berkelanjutan, baik secara langsung melalui pembiayaan sektor-sektor ramah lingkungan, maupun secara tidak langsung melalui pemberdayaan

UMKM. Upaya ini sejalan dengan semangat kemitraan multi pihak (multi-stakeholder partnership) dalam mewujudkan tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan.

### **Peran Bank Central Asia (BCA) Syariah**

**Tabel 2.** Peran Bank Central Asia (BCA) Syariah.

NO	Sektor	Tahun		
		2021	2022	2023
1.	Total Aset	<b>10.642,3</b>	<b>12.669,9</b>	<b>14.471,7</b>
2.	Total Aset Produktif	10.269,3	12.679,1	14.434,8
3.	Giro dan Penempatan pada Bank Indonesia	1.138,2	935,4	1.056,6
4.	Surat-surat Berharga	3.103,5	4.110,9	4.288,9
5.	Pembiayaan	6.248,5	7.585,9	9.013,6
6.	Total Liabilitas	<b>7.801,5</b>	<b>9.739,0</b>	<b>11.389,2</b>
7.	Dana Pihak Ketiga	7.677,9	9.481,6	10.949,5
8.	Giro	1.209,5	2.104,0	2.076,1
9.	Tabungan	1.373,0	1.556,1	2.096,6
10.	Deposito	5.095,3	5.821,6	6.776,8
11.	Pembiayaan yang Diterima	-	-	-
12.	Total Ekuitas	<b>2.840,8</b>	<b>2.930,9</b>	<b>3.082,5</b>

Berdasarkan tabel diatas dijeskan bahwa laporan keuangan BCA Syariah tahun 2021-2023 mencerminkan pertumbuhan yang positif dalam berbagai aspek keuangan seperti asset, pembiayaan, dan dana pihak ketiga (DPK).

Total aset meningkat dari Rp 10.642,3 miliar (2021) menjadi Rp 14.471,7 miliar (2023), sedangkan aset produktif juga mengalami kenaikan daei Rp 10.269,3 miliar menjadi Rp 14.434,8 miliar. Peningkatan ini mencerminkan kapasitas keuangan BCA Syariah yang semakin besar. Dengan aset yang kuat, bank mampu menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak, seperti UMKM, koperasi, Lembaga pendidikan, dan sektor publik, untuk membiayai proyek-proyek ekonomi produktif yang mendukung Pembangunan berkelanjutan.

Pembiayaan mengalami peningkatan dari Rp 6.248,5 miliar (2021) menjadi Rp 9.013,6 miliar (2023). Kenaikan pembiayaan menunjukkan bahwa BCA Syariah aktif menyalurkan dana ke sektor riil. Pembiayaan ini tidak hanya menyasar individu, tetapi juga pelaku usaha dan industri yang membutuhkan modal usaha. Melalui skema pembiayaan syariah (mudharabah, musyarakah, murabahah) bank membangun kemitraan ekonomi berbasis prinsip tolong menolong.

DPK mengalami peningkatan dari Rp 7.677,9 miliar menjadi Rp 10.949,5 miliar. Kenaikan DPK menunjukkan kepercayaan Masyarakat terhadap BCA Syariah. Ini juga menggambarkan kemitraan antara bank dan masyarakat sebagai penyedia dana, Dimana dana yang dihimpun digunakan untuk membiayai sektor-sektor yang mendukung Pembangunan.

DPK menjadi penghubung langsung antara nasabah penyimpan dana dengan penerima manfaat (nasabah pembiayaan), menciptakan ekosistem ekonomi berbasis partisipasi dan kepercayaan

Ekuitas mengalami peningkatan dari Rp 2.840,8 miliar menjadi Rp 3.082,5 miliar. Stabilitas permodalan membuat BCA Syariah mampu menjaga keberlanjutan operasional dan menjalin kemitraan jangka Panjang dengan stakeholder, termasuk Lembaga pemerintah, NGO, dan institusi sosial.

Pembiayaan yang diterima kosong selama tiga tahun. Hal ini menunjukkan bahwa BCA Syariah mendanai aktivitasnya secara mandiri dari dana masyarakat (DPK), bukan dari pinjaman eksternal. Ini memperkuat peran bank dalam menciptakan kemitraan dari dalam negeri (local partnership) yang berkelanjutan, tanpa ketergantungan pada dana luar negeri atau pinjaman berbunga.

Berdasarkan tabel laporan keuangan tersebut, dapat dikatakan bahwa BCA Syariah secara tidak langsung memainkan peran penting dalam membangun kemitraan untuk pencapaian tujuan Pembangunan berkelanjutan. Hal ini terlihat dari peningkatan pembiayaan sebagai bentuk kerja sama dengan pelaku ekonomi, pengelolaan dana masyarakat yang amanah, menciptakan hubungan kemitraan bank-nasabah, fondasi keuangan yang kuat untuk menjalin kerja sama jangka Panjang dengan sektor publik dan swasta, prinsip syariah yang mendorong kolaborasi, keadilan dan keberlanjutan. Dengan demikian BCA Syariah tidak hanya menjadi lembaga keuangan, tetapi juga agen Pembangunan melalui pendekatan kemitraan strategis yang sejalan dengan visi SDGs poin 17.

### **Peran Bank Muamalat**

Bank muamalat adalah bank di Indonesia yang menerapkan konsep perbankan syariah. Bank ini didirikan pada tahun 1991. Dan mulai beroperasi pada tahun 1994. Bankmuamalat beroperasi berdasarkan prinsip syariah, seperti larangan riba, transaksi yang adil, dan pembagian resiko. Bank ini menyediakan berbagai layanan perbankan, seperti tabungan, pembiayaan, investasi, dan layanan digital.

Bank Muamalat telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk mendukung Pembangunan berkelanjutan antara tahun 2021-2023. Berikut adalah rincian pembiayaan yang telah dilakukan oleh bank Muamalat.

**Tabel 3.** Peran Bank Muamalat.

Uraian	Tahun		
	2021	2022	2023
Jumlah Pendapatan Bank sebagai Mudharib	2.139	1.764	2.153
Laba Bersih	9	27	13
Jumlah Aset	58.899	61.364	66.953
Jumlah Liabilitas	11.555	10.566	15.048
Jumlah Dana Syirkah Temporer	43.358	45.597	46.488
Jumlah Ekuitas	3.986	5.202	5.216

Berdasarkan data laporan keuangan Bank Muamalat tahun 2021-2023, dapat dilihat adanya fluktuasi pada beberapa indikator keuangan utama yang mencerminkan dinamika operasional dan komitmen bank dalam memperkuat kemitraan serta kontribusi terhadap tujuan Pembangunan berkelanjutan.

Pendapatan bank sebagai mudharib menunjukkan ketidak konsistenan, dengan nilai sebesar Rp 2.139 miliar pada tahun 2021, turun menjadi Rp 1.764 miliar pada tahun 2022, dan Kembali naik menjadi Rp 2.153 miliar pada tahun 2023. Meskipun terjadi penurunan di tahun 2022, kenaikan di tahun 2023 mengindikasikan adanya pemulihan dalam aktivitas pembiayaan berbasis kemitraan yang esensial dalam mendukung kolaborasi ekonomi inklusif.

Laba bersih juga mengalami fluktuasi, yaitu Rp 9 miliar pada tahun 2021, naik signifikan menjadi Rp 27 miliar pada tahun 2022, dan Kembali menurun Rp 13 miliar pada tahun 2023. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun terdapat peningkatan efisiensi atau hasil dari kerja sama strategis pada tahun 2022, namun tantangan ekonomi tetap mempengaruhi stabilitas laba bank.

Aset Bank Muamalat mengalami pertumbuhan yang konsisten, dari Rp 58.899 miliar di tahun 2021, menjadi Rp 66.953 di tahun 2023. Peningkatan aset ini mencerminkan komitmen bank dalam memperluas perannya melalui kerja sama ekonomi, investasi produktif, dan penghimpunan dana yang dapat memperkuat jaringan mitra usaha.

Liabilitas bank juga sempat menurun pada 2022, dari Rp 11.555 miliar menjadi Rp 10.566 miliar, namun meningkat tajam menjadi Rp 15.048 miliar pada 2023. Kenaikan ini bisa dikaitkan dengan strategi pembiayaan eksternal yang digunakan untuk mendukung ekspansi kerja sama dan pembiayaan proyek-proyek berkelanjutan.

Dana syirkah temporer sebagai bentuk partisipasi nasabah dalam investasi syariah juga mengalami peningkatan yang stabil dari Rp 43.358 miliar pada 2021 menjadi Rp 46.488 miliar pada 2023, menunjukkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap skema kemitraan syariah yang dikelola bank.



Sementara itu, ekuitas bank juga mengalami peningkatan dari 3.986 miliar pada 2021 menjadi 5.216 miliar pada 2023, mencerminkan penguatan modal sendiri yang penting untuk menjaga keberlanjutan kemitraan jangka panjang.

Secara keseluruhan data tersebut memperlihatkan bahwa meskipun terdapat tantangan dari sisi pendapatan dan laba, Bank Muamalat tetap menunjukkan tren positif dalam penguatan aset dan kemitraan berbasis nilai-nilai syariah.

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa bank syariah memiliki kontribusi yang signifikan dalam mendukung kemitraan untuk pencapaian tujuan Pembangunan berkelanjutan (SDGs). Hal ini tercermin dari meningkatnya penyaluran pembiayaan berkelanjutan ke berbagai sektor strategis, seperti energi terbarukan, pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, transportasi ramah lingkungan, serta produk-produk yang mendukung efisiensi lingkungan. Yang paling dominan adalah sektor UMKM, yang menerima porsi terbesar dari total pembiayaan berkelanjutan dengan tren yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan adanya kemitraan aktif antara bank syariah dan pelaku usaha mikro dan kecil sebagai bagian dari upaya inklusi ekonomi. Dengan demikian bank syariah tidak hanya berperan sebagai lembaga keuangan semata, tetapi juga sebagai mitra pembangunan yang memperkuat kolaborasi antara sektor keuangan, sektor usaha, serta komunitas lokal. Peran ini membuktikan bahwa sistem keuangan syariah memiliki potensi besar dalam memperkuat sinergi pembangunan melalui pendekatan yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan.

#### **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian data sekunder dari tiga bank syariah selama periode 2021-2023, dapat disimpulkan bahwa bank syariah mengalami pertumbuhan positif dalam aspek keuangan maupun perannya dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan. Hal ini terlihat dari peningkatan jumlah aset, dana syirkah temporer dan ekuitas yang menunjukkan stabilitas dan kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan syariah. Selain itu pembiayaan yang disalurkan juga mengalami peningkatan signifikan, khususnya pada sektor-sektor produktif yang berdampak langsung pada penguatan ekonomi masyarakat.

Dalam konteks keberlanjutan bank syariah terbukti berperan aktif dalam menyalurkan pembiayaan pada sektor-sektor yang mendukung Pembangunan berkelanjutan. Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi penerima manfaat utama dari pembiayaan tersebut, dengan tren yang meningkat setiap tahunnya.

## DAFTAR REFERENSI

- Afrilia, T. N., & Mustofa, N. H. (2021). Pengaruh karakteristik wirausaha, modal usaha, strategi pemasaran terhadap perkembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM) dengan inovasi sebagai variabel intervening. *Sketsa Bisnis*, 8(2), 82–98. <https://doi.org/10.35891/jsb.v8i2.2687>
- Anjani, A. G., Susyanti, J., & Salim, M. A. (2019). Pengaruh kualitas aset, likuiditas, rentabilitas, efisiensi operasional, dan sensitivitas terhadap tingkat kecukupan modal perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (Studi kasus pada industri perbankan periode tahun 2015–2017). *E-JRM: Elektronik Jurnal Riset Manajemen*, 8(8).
- Arqam, M., Saputra, M. A., Rifaldi, A., Kahfi, A. A., & Syarif, M. (2024). *Bank dan lembaga keuangan*. Nas Media Pustaka.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. SAGE Publications.
- Desfan, R. (2022). *Analisis efisiensi kinerja perbankan menggunakan metode stochastic frontier approach dan data envelopment analysis (Studi pada bank umum syari'ah di Indonesia periode 2015–2019)* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung].
- Fahrani, I., Suryana, D. F., Ismail, A. S., & Marlina, L. (2023). Analisis pemikiran ekonomi masa Utsman bin Affan dan relevansinya di zaman sekarang. *Al-Istimrar: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1), 59–68. <https://doi.org/10.59342/istimrar.v2i1.247>
- Firdianto, H., & Sudiyatno, B. (2024). Efek kinerja keuangan terhadap poin perusahaan atas perusahaan perbankan akan terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019–2022. *Journal of Economic, Business and Accounting (Costing)*, 7(4), 11184–11470. <https://doi.org/10.31539/costing.v7i4.10458>
- Kasmir. (2018). *Bank dan lembaga keuangan lainnya* (Edisi revisi). Rajawali Pers.
- Lontoh, J. K., Tumbel, A. L., & Kawet, R. (2020). Pemanfaatan media sosial sebagai strategi promosi bagi pengembangan pemasaran wisata Danau Linow di Kota Tomohon. *Jurnal Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi*, 8(4), 11–20.\*
- Nur Fajriah, R., & Risqy Kurniawan, R. (2022). Perkembangan kebijakan ekonomi Islam masa Khulafah Rasyidin. *Jurnal Al-Ibar*, 1, 15.
- Qonitatillah, M. (2021). *Efek non performing loan (NPL), likuiditas, rentabilitas, efisiensi operasional dan sensitivitas terhadap rasio kecukupan modal (Studi kasus atas perbankan akan terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2017–2019)* [Skripsi].
- Sandi, Q., Syukri, A., & Us, K. A. (2019). Manajemen sumber daya manusia dalam meningkatkan keunggulan kompetitif. *Al Ghazali*. [https://ejournal.stainupwr.ac.id/index.php/al\\_ghzali/article/view/124](https://ejournal.stainupwr.ac.id/index.php/al_ghzali/article/view/124)
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian dan pengembangan (Research and Development/R&D)*. Alfabeta.